

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta analisis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis hendak menyampaikan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana pada usaha penambangan tanpa izin di Kabupaten Belitung tahun 2014-2019. Penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku usaha penambangan tanpa izin di Kabupaten Belitung dapat dikatakan sudah cukup efektif. Karena bila dilihat dari jumlah perkara dari tahun ke tahun maka jumlah perkara yang ditangani oleh PN Tanjungpandan cenderung menurun setiap tahunnya. Namun, bila dilihat dari tujuan pemidanaan yakni untuk memberikan efek jera maka tujuan tersebut belumlah tercapai, hal ini karena masih adanya pelaku penambangan tanpa izin yang setelah menjalani hukumannya, namun setelah masa hukumannya telah selesai belau masih kembali mengulangi perbuatannya tersebut.

Pelaku penambangan tanpa izin juga masih cukup banyak di Kabupaten Belitung, karena aktivitas penambangan timah masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu yang singkat. Selain itu, sanksi-sanksi yang dikenakan pada perkara penambangan tanpa izin juga dapat dikatakan cukup ringan, sehingga belum memberikan efek jera kepada mereka yang menerima sanksi tersebut.

Pemerintah daerah yang juga masih terkesan mengabaikan kepentingan para penambang rakyat juga menjadi salah satu penyebab masih maraknya terjadi aktivitas penambangan tanpa izin di Kabupaten Belitung. Pemerintah daerah hingga saat ini hanya berfokus untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku penambangan tanpa izin, namun tidak melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap mereka. Sekalipun pemerintah melakukan himbauan-himbauan terhadap mereka, itupun hanya berupa

himbauan tanpa adanya solusi atau jalan keluar bagi mereka yang terpaksa melakukan hal tersebut. Pemerintah daerah selama ini hanya menghimbau untuk meninggalkan aktivitas penambangan, namun tidak memberikan alternatif berupa lapangan pekerjaan lainnya. Sementara desakan kebutuhan ekonomi tidak dapat diabaikan oleh para penambang rakyat, kehidupan mereka harus tetap berjalan, tidak dapat bergantung dan berhadapan seluruhnya kepada pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemprov Bangka Belitung menghadirkan solusi bagi para penambang rakyat di Kabupaten Belitung yang hendak mengurus perizinan, semisal dengan memudahkan akses bagi para penambang rakyat untuk mengurus perizinan tanpa harus ke Dinas ESDM yang berada di Kota Pangkalpinang yang berada di Pulau Bangka, yang mana hal tersebut menyulitkan bagi para penambang rakyat yang berada di Kabupaten Belitung. Bentuk dari memudahkan akses bagi para penambang rakyat tersebut dapat berupa membuka pelayanan pengurusan perizinan yang mendatangi langsung para penambang rakyat, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaannya dalam waktu lama untuk mengurus perizinan.
2. Mendorong agar Pemkab Belitung merealisasikan rencana untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah dalam waktu dekat dan serius dalam mewujudkan hal tersebut, karena bukan tidak mungkin dengan majunya sektor pariwisata di Kabupaten Belitung dapat menjadikan masyarakat lambat laun untuk meninggalkan sektor pertambangan dan beralih ke sektor pariwisata.
3. Penggunaan pendekatan kearifan lokal berupa melibatkan lembaga adat untuk membantu pemerintah daerah dalam membina para penambang rakyat.